

## ULASAN

### **NANGGROE ACEH DARUSSALAM MENUJU PROVINSI HIJAU: PELUANG DAN TANTANGAN**

#### *Nanggroe Aceh Darussalam toward Green Province : Opportunity and Obstacle*

RICKY AVENZORA

*Studio Rekreasi Alam dan Ekowisata  
Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata  
Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor*

**Diterima 5 September 2006 / Disetujui 10 November 2006**

#### **ABSTRACT**

*In order to support the new wave of environmental movement in Nanggroe Aceh Darussalam, so called the logging moratorium and green province, a three months qualitative study has been taken. The study has been aimed to find the recent dynamic of some stake holders those potentially play important role to achieve the green vision. The result shows that the capacity of human resources, and the social-dynamic of post-conflict community becoming a crucial variabls to drive an efficient and effective green movement mission.*

*Keywords: Illegal logging, moratorium, green province, Nanggroe Aceh Darussalam, social dynamic.*

#### **PENDAHULUAN**

Jika ada yang bertanya tentang contoh sisa hutan tropika yang masih baik di Indonesia, maka salah satu jawabnya adalah hutan di Nanggroe Aceh Darussalam. Namun demikian, jika ada yang bertanya tentang *forest abusement* yang paling kompleks di Indonesia, maka jawabnya juga adalah hutan di Nanggroe Aceh Darussalam. Selama 30 tahun terakhir, kawasan hutan di Nanggroe Aceh Darussalam setidaknya telah mengalami tekanan sangat berat dari berbagai macam bentuk perusakan hutan, baik dalam bentuk berbagai pelanggaran ataupun *illegal logging* yang dilakukan oleh HPH yang pernah beroperasi di NAD, *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat umum, maupun *illegal logging* yang berlindung dibalik kedok konflik bersenjata. Tidak sampai di situ, tekanan atas kawasan hutan di NAD juga diperburuk oleh *conflict of interest* antar sektor yang berkeinginan mengkonversi kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan, pertanian maupun peternakan, dan juga oleh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami yang terpaksa memangkas banyak fase perencanaan dan koordinasi karena kondisi emergensi dan keterbatasan waktu serta tenaga.

Ketika berbagai tekanan yang sangat berat selama 30 tahun itu ternyata masih menyisakan tegakan hutan yang secara objektif tergolong sangat baik dan cukup luas - dan

ketika berbagai daerah lain di Indonesia masih berdiskusi pada tahap kabupaten konservasi - maka tidaklah dapat dikatakan terlalu ambisius jika saat ini Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam bermotivasi untuk menjadikan Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Provinsi Hijau (Green Province). Namun demikian, gagasan yang sangat ideal dan prospektif tersebut kiranya perlu dicermati bersama demi tersusunnya langkah-langkah yang efisien dan efektif serta strategis guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Jika tidak, maka berbagai kelemahan dan kegagalan *green movement* yang pernah terjadi secara global akan kembali terjadi, sehingga motivasi serta gerakan yang ada hanya akan menjadi *political lipstick* yang tidak hanya sangat boros akan biaya, waktu dan tenaga tapi juga sangat kontra produktif atas proses pembangunan yang sedang berjalan.

Untuk persoalan di atas, maka dalam tulisan ini akan diulas beberapa dinamika penting dari setiap elemen dan stakeholder yang sangat potensial dan harus bahu membahu dalam mewujudkan Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Green Province pertama di Indonesia, yaitu masyarakat, institusi kehutanan, dan lembaga swadaya kehutanan. Dengan diketahui dan dimengertinya dinamika yang ada, maka diharapkan akan didapat suatu perspektif dan metoda terbaik, efisien dan efektif untuk mewujudkan terciptanya wilayah NAD sebagai suatu *green province*.. Semoga tulisan ini dapat menjadi bahan untuk memperkaya

pemikiran dan wawasan dalam mewujudkan Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Propinsi Hijau.

## PELUANG

### Potensi Hutan Nanggroe Aceh Darussalam

Meskipun hingga saat ini tidak ada data terbaru yang representatif, valid dan dapat dipercaya untuk menggambarkan kondisi hutan di NAD terkini di NAD, namun kiranya gambaran tentang luas dan sebaran hutan seperti pada **Gambar 1** dapat dipergunakan untuk membangun wawasan tentang kondisi hutan di NAD.

Sedangkan gambaran luas dari fungsi dan peruntukan hutan yang ada adalah sebagaimana dituangkan pada **Tabel 1**.

Beberapa foto berikut (Gambar 2, 3, 4 dan 5) dapat digunakan sebagai sumber inspirasi dalam menangkap visualisasi kekayaan kawasan hutan di NAD. Dari gambar tersebut dapat dikatakan bahwa rentang ekologi yang terdapat di kawasan hutan NAD sangat lengkap dan luas; sangat kaya dengan plasma nutfah, dan potensi jasa lingkungan. Sebagian foto-foto yang divisualkan ini adalah merupakan foto-foto koleksi Pusat Informasi Konservasi Alam (PIKA) Departemen Kehutanan (2006).

Tabel 1. Berbagai Fungsi Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam

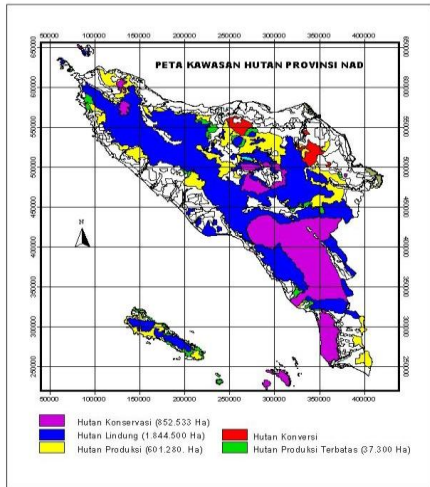
Status Kawasan	Luas (Ha)
<b>I. KAWASAN LINDUNG</b>	<b>2.697.033</b>
<b>A. Hutan Konservasi</b>	
CA. Pinus Janthoi	16.640
CA. Serbajadi	300
SM. Rawa Singkil	102.370
TAHURA Pocut Meurah Intan	6.220
TN. Gunung Leuser	623.987
TWA. Kapualauan Banyak	15.000
TWA. Lhok Asan (PLG)	112
TB. Lingga Isaq	86.704
<b>B. Hutan Lindung</b>	<b>1.844.500</b>
<b>II. KAWASAN BUDIDAYA</b>	<b>638.580</b>
A. Hutan Produksi	638.580
B. Hutan Produksi Terbatas	37.300
C. Hutan Produksi Tetap	601.280

Sumber : Dinas Kehutanan NAD (2006)

Berbagai kekayaan plasma nutfah dan jasa lingkungan yang telah divisualisasikan tersebut di atas dapat dikatakan sebagai sisa dari berbagai *forest abusements* yang sangat kompleks selama 30 tahun di NAD. Untuk memperjelas bukti tentang proses degradasi hutan yang pernah terjadi di NAD, maka pada Gambar 6 ditunjukkan sebaran areal kerja HPH yang pernah beroperasi, dan **Gambar 7** ditunjukkan variasi modus perusakan hutan yang masih terjadi hingga saat ini.

### Modal Sosial (*Social Capital*)

Jika riuh rendahnya dinamika sosial dan budaya yang pernah terjadi di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam ditelusuri secara obyektif maka dapat disimpulkan bahwa secara tradisional masyarakat NAD telah mempunyai suatu tatanan hidup yang sangat kuat dan masih eksis diakui dan dipanuti hingga saat ini. Tatanan hidup tersebut merupakan modal yang penting untuk kembali diberdayakan dalam membangun *sustainable livelihood* di NAD pada masa depan. Sebagai contoh, pada **Tabel 2** dapat dilihat tatanan kemasyarakatan yang mengatur antara sesama manusia dan alam.



Gambar 1. Peta Kawasan Hutan Provinsi NAD (Dephut, 2003)



Gambar 2. Rentang Ekosistem Penting di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam



Gambar 3. Beberapa Fauna Langka dan Penting di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam



Gambar 4. Beberapa Flora Unik dan Penting di Nanggroe Aceh Darussalam

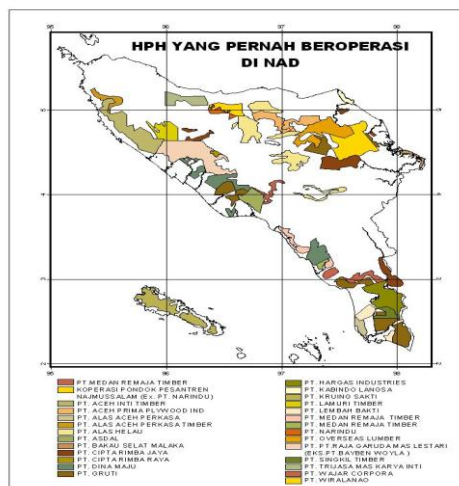


**Atraksi Satwa Liar**  
(Foto Dokumentasi BKSDA NAD)

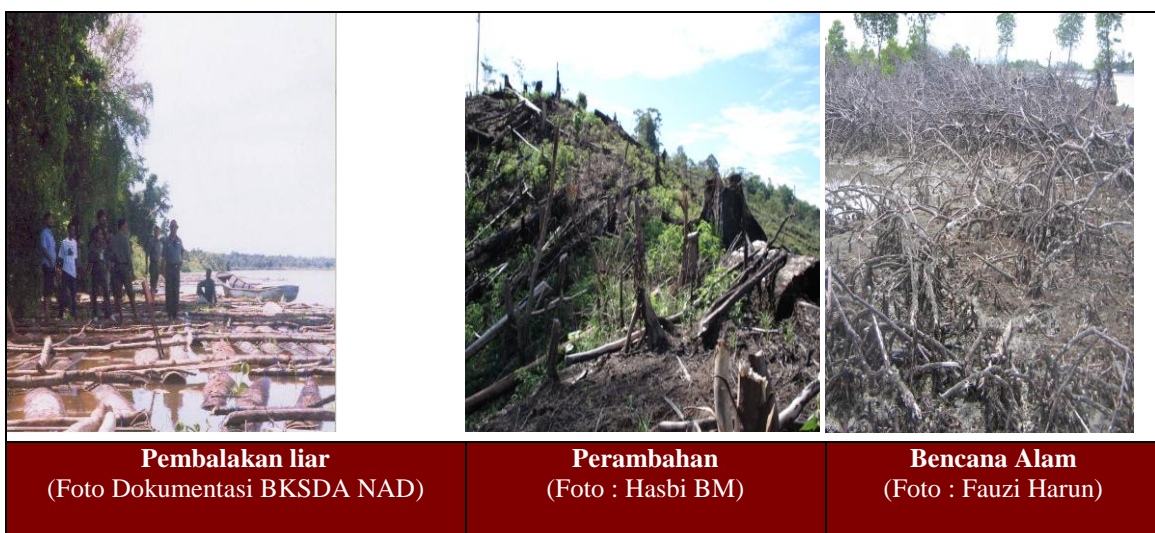
**Panorama Laut Pulau Weh Sabang**  
(Foto : Dokumentas BKSDA NAD)

**Rafting Di Sungai Alas Aceh Tenggara**  
( Foto : Dokumentasi PIKA)

Gambar 5. Beberapa Sumber Daya Wisata Alam di Nanggroe Aceh Darussalam



Gambar 6. Kawasan HPH yang pernah Beroperasi di Nanggroe Aceh Darussalam (diolah dari Dinas Kehutanan Propinsi NAD).



**Pembalakan liar**  
(Foto Dokumentasi BKSDA NAD)

**Perambahan**  
(Foto : Hasbi BM)

**Bencana Alam**  
(Foto : Fauzi Harun)

Gambar 7. Ancaman Terhadap Potensi & Kawasan Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam

Tabel 2. Tatanan Pimpinan Tradisional Masyarakat NAD Dalam Mengatur Interaksi Sesama Manusia dan Alam

No	Ranah Kehidupan	Pimpinan Kebijakan Tradisional	Pimpinan Teknis
1.	Hutan	<b>Bintara Uteun:</b> mengatur kebijakan pemanfaatan kawasan hutan yang berada dalam wilayah tradisionalnya	Pawang Uteun Pawang Rusa Pawang Harimau Pawang Gajah Pawang Kaye Pawang Enau
2.	Laut	<b>Panglima Laot:</b> mengatur kebijakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat dalam wilayah tradisionalnya	Pawang unkoet
3.	Sawah	<b>Keujreun Blang:</b> mengatur kenduri blang dan upacara lainnya	Panglima Meugoe: mengatur musim tanam serta aba-aba turun ke sawah
4.	Perkebunan	<b>Peutuwa:</b> mengatur kenduri dan upacara lainnya	Waki Lueung: ahli mengatur pembagian air sawah Panglima parang: ahli mengatur musim tanam dan tatanan perkebunan
5.	Pasar dan Pusat Kegiatan Ekonomi	<b>Haria :</b> Kepala uro peukan dan pemungut retribusi  <b>Syahbandar:</b> mengatur transportasi air	Tandi: ahli timbangan  Syahbanda Keudae: memungut <i>hak kamsie</i> sebagai komisi untuk jaminan keamanan berbagai barang yang diperdagangkan dan disimpan pada wilayahnya

**Sumber:** Wawancara Langsung dengan Ayah Panton (budayawan, di Banda Aceh), Bapak Muhammad (Pawang Uteun di Meukeuk, A. Selatan), dan Bapak A. Hamid (Pawang Uteun, di Padang Tiji, Pidie), Juni 2006.

Hal berikut yang juga sangat perlu dipelajari dan menjadi perhatian adalah bahwa masyarakat NAD sejak dahulu kala secara disiplin dan konsisten menerapkan berbagai ajaran Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam bukan hanya diadopsi menjadi sumber hukum bagi segala sendi kehidupan masyarakatnya namun juga dijawantahkan secara nyata dalam bentuk tatanan pengorganisasian fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya pola tatanan Geuchik yang berpasangan dengan Imum Meunasah, pola tatanan Imum Mukim (dengan perangkat Tuha Peut dan Tuha Lapan) yang berpasangan dengan Raja Imum, dan pola tatanan Kadi Malikul Adil hingga Kadi Ratbul Jalil adalah salah satu contoh nyata

tentang dijalinnnya fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta fungsi pertimbangan agung (*wisdom sources*) secara baik dan harmonis ke dalam satu kesatuan arah pembangunan bagi masyarakatnya dengan atmosfir islamiah sebagai sendi kehidupan utama.

Jika tatanan kehidupan yang dipaparkan di atas ditelaah dengan pertanyaan tentang apa sesungguhnya yang menjadi orientasi hidup masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam, maka secara filosofis jawabannya dapat ditelaah melalui pepatah masyarakat Aceh yang berbunyi *Raja Dunya Hanjeut Beuganto, Raja Nanggroe Nyang Beutuka Tuka, Raja Jeut Meuganto, Nanggroe Hanjeut*

*Meutuka*<sup>1</sup>. Pepatah tersebut tidak hanya menggambarkan tentang keteguhan prinsip masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam dalam menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sosial, namun sesungguhnya juga menggambarkan lebarnya rentang toleransi berkehidupan sosial. Dalam bahasa praktis pepatah tersebut dapat dimaknai *jika pun negeri harus berganti pemimpin, walaupun kekuasaan dan kesejahteraan harus dibagi, maka Tuhan tidak boleh berganti dan nama negeri tidak boleh diubah*. Jika dikaitkan dengan sejarah Aceh, maka barangkali tidak salah apabila dapat disimpulkan bahwa masyarakat Aceh sangat *open minded*, ingin bekerja sama, menjunjung tinggi objektifitas, realistik dan sangat adaptif dengan perubahan zaman asalkan mereka tidak disuruh untuk mempersekutukan Sang Maha Pencipta dan tidak disuruh menghilangkan nama negeri mereka yang menjadi identitas penting bagi anggota masyarakatnya.

Jika kemajemukan orientasi hidup yang berkembang ditengah keseharian hidup masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam boleh disederhanakan, maka dapat dikatakan ada empat hal penting yang selalu diharapkan dan 5 hal penting yang selalu dihindari oleh mereka. Empat harapan masyarakat itu adalah *Maleum* (berilmu), *Kaya* (berharta), *Meutuwah* (berwibawa), dan *Meubahgia* (berbahagia). Sedangkan 5 hal yang selalu diantisipasi dan dihindari oleh mereka adalah *Pang Phoe* (tidak memiliki rumah), *Ruyang Rayoe* (tidak memiliki sandang), *Duek troe* (tidak memiliki pangan), *Saket Asoe* (sakit), dan *Buta Tuloe* (tidak berpendidikan).

Untuk mencapai semua orientasi tersebut di atas, maka ada beberapa pandangan hidup yang melekat dan menjadi orientasi masyarakat NAD dalam berusaha yaitu : *Pang Ule Buet*, *Ibadah* dan *Pang Ule Hareukat*, *Meugo*<sup>2</sup>. Pandangan hidup tersebut juga dilengkapi dengan pantun yang berbunyi *Taduek Ta Meugo-meugo, Pruet Troe Aneuk Na*<sup>3</sup>, dan pantun yang berbunyi *Kaya Meuh Han Meusampe, Kaya Pade Meusempurna*<sup>4</sup>. Berbagai pandangan hidup tersebut juga terjawantah dalam konvensi bersama yang berlaku secara tradisional dalam bentuk aturan pemanfaatan sumberdaya alam nabati, yaitu seperti yang terkandung dalam beberapa pantun berikut ini :

*Tajak U Glee Tajak Ceumecah  
Takah Beu Luwah Ta Tajok Padee  
Abeh Padee Tapula Tanaman Keras*

<sup>1</sup> Tuhan tidak boleh berganti, hanya pimpinan negeri lah yang bertukar-tukar. Meskipun Pimpinan Negeri harus berganti, maka nama negeri tidak boleh ikut diganti. (Diinformasikan oleh Ayah Panton, budayawan di Banda Aceh, 2007).

<sup>2</sup> Keutamaan dari suatu pekerjaan adalah Ibadah, sedangkan keutamaan dari usaha adalah Pertanian.

<sup>3</sup> Marilah kita bertani agar tidak kelaparan dan agar berketurunan.

<sup>4</sup> Kekayaan dalam bentuk emas belumlah berarti apa-apa, jika tidak memiliki pertanian dan padi.

*Bek Tandus Tanoh Laen Tapula*<sup>5</sup>

*Lam Udeep Tameusaree – Lam Meugle Tameubila  
Lam Lampoh Tameutulongalang – Lam Meublang  
Tameusyudara*<sup>6</sup>

*Ie Cong Bak Manggeh Di Meulet Siwah – Ie cong Bak  
Lawah Umpung Seurangga  
Menye Meuheut Nanggroe Bek Lam Sosah – Uteun Nyang  
Luwah Tapapah Beuna*<sup>7</sup>

*Ta Jak U Gle – Jikap Le Rimueng  
Ta Jak U Krueng – Jikap Le Buya  
Tajak U Laot – Jitop Le Paroe*<sup>8</sup>

Dari pantun terakhir di atas sangat jelas terlihat dan terasa suatu ajaran yang mengingatkan seluruh masyarakat Aceh untuk perlu mengenali, mengingat dan menghormati karakter, tuah dan hak hidup dari setiap makhluk Tuhan. Dalam keseharian, arahan tersebut dituangkan dalam beberapa kaidah-kaidah sederhana yang masih dikenali dan dipatuhi oleh masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam hingga saat ini, yaitu : (1) adanya larangan menebang kayu pada saat musim hujan, (2) dalam berburu adanya aturan hasil buruan harus disisakan dan ditinggal di dalam hutan, (3) adanya larangan menggunakan api dan asap dalam mengambil madu, dan (4) adanya ritual kontrak sosial dalam menebang pohon tualang yang akan dipakai untuk membuat gendang (rapai), serta (5) adanya larangan berbuat gaduh di dalam goa-goa alam.

Jika adat dan budaya masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam digali lebih jauh, maka dari Upacara Meuramin (upacara bertamasya yang diperuntukan bagi wanita-wanita yang sedang menjalani kehamilan sesudah 120 hari<sup>9</sup>) juga dapat disimpulkan bahwa adat dan budaya Nanggroe Aceh Darussalam telah mengajarkan tentang betapa pentingnya arti alam pada masyarakatnya bahkan sejak mereka masih di dalam kandungan. Pada *Upacara Meuramin* kepada seorang wanita yang sedang hamil diperkenalkan betapa indahnya alam dan lingkungan hidup mereka agar hatinya senang dan bahagia sehingga diharapkan dia mampu untuk bersyukur

<sup>5</sup> Pergi ke gunung membersihkan lahan, bersih dengan baik dan menanam padi. Sesudah padi tanamlah pohon-pohon, dan agar tanah tak tandus tanam pula tumbuhan lain.

<sup>6</sup> Dalam hidup kita bersama, di gunung kita saling membela, dikebun saling tolong menolong, di sawah kita bersaudara.

<sup>7</sup> Ibarat burung siwah di atas pohon manggis, ibarat serangga di atas pohon lawah. Jika ingin negeri tidak susah maka hutan yang luas harus dipelihara sebaik-baiknya.

<sup>8</sup> Pergi ke hutan akan bertemu harimau, pergi ke sungai akan bertemu buaya, sedangkan jika pergi ke laut akan bertemu ikan pari

<sup>9</sup> Di dalam Islam diajarkan bahwa roh anak manusia ditiupkan oleh ALLAH kedalam rahim ibunya pada saat usia kehamilan 120 hari. Upacara Meuramin ini diceritakan dan dijelaskan oleh Ayah Panton (budayawan di Banda Aceh, 2007).

kepada Tuhan dan bermohon agar anak yang sedang ia kandung tersebut dapat tumbuh sehat dan sempurna serta berguna bagi agama, keluarga dan lingkungan dimana ia dilahirkan nanti. Dari informasi ini dapat pula disimpulkan bahwa *aneuk negri* di Nanggroe Aceh Darussalam sangat menghargai dan berkepentingan atas nilai-nilai estetika lingkungan.

Memperhatikan berbagai informasi tentang *social capital* tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam sejak dahulu kala telah secara detail mengidentifikasi keterkaitan manusia dengan alam, serta menentukan *rule of the game*, ancaman dan dampak pada setiap keterkaitan. Hal ini merupakan kekuatan dan peluang yang sangat potensial untuk melaksanakan paradigma *community based forestry development* - yang secara internasional mencuat selama satu dekade belakangan ini - dalam mengelaborasi visi dan misi serta implementasi pembangunan kehutanan di NAD ke masa depan.

Ibarat tak ada gading yang tak retak, maka berbagai nilai luhur yang telah dipaparkan di atas dewasa ini kiranya juga perlu diberdayakan dan didudukkan secara tepat, baik dan benar dalam keseharian hidup bermasyarakat. Dalam konteks kehutanan, bisa disebutkan bahwa saat ini hampir tidak ada seorangpun *Bentara Uteun* yang masih hidup. Dari 100 *Pawang Uteun* yang telah sempat diidentifikasi selama tahun 2006 tidak satupun yang mengatakan bahwa usia mereka yang telah lanjut saat ini mereka telah menemukan anggota masyarakat lainnya yang tertarik dan dianggap cukup mampu untuk meneruskan tongkat estafet jabatan sosial tersebut. Hal ini membuat tatanan sosial *Pawang Uteun* dan kaidah-kaidah yang diembannya terancam punah.

Dalam konteks yang lebih luas, juga perlu diwaspadai bahwa dewasa ini ada dinamika sosial yang dapat menyebabkan dangkal dan pudarnya berbagai nilai filosofis yang terkandung dalam berbagai tatanan tradisional yang telah dipaparkan di atas. Beberapa indikator yang mudah dikenali di tengah masyarakat saat ini adalah : (1) semakin tidak proporsionalnya dinamika *the franky minority* yang berpola lebih suka berantipati daripada berempati, (2) semakin tidak proporsionalnya orientasi kompetisi yang berujung pada semakin sulit terjadinya kerja sama dan timbulnya kompetisi negatif, dan (3) semakin sempitnya rentang preferensi bekerja. Meskipun semua indikator tersebut masih dalam rentang normalitas dinamika masyarakat yang tergolong pasca konflik dan pasca bencana, namun penting untuk disadari bersama bahwa dinamika tersebut haruslah dijaga agar tidak terlanjur menjadi perilaku baru yang kontra produktif di tengah masyarakat.

## TANTANGAN

Berbicara tentang dinamika institusi dan lembaga swadaya kehutanan di Nanggroe Aceh Darussalam maka setidaknya ada 3 aspek penting yang patut untuk diperbincangkan, yaitu : (1) Kualitas Sumberdaya Manusia, (2) Efisiensi dan Efektifitas Program, dan (3) Networking. Tiga aspek tersebut sangat penting mempengaruhi performa institusi dan lembaga swadaya kehutanan di NAD.

### Kualitas Sumberdaya Manusia.

Untuk memper-bincangkan kualitas sumberdaya manusia pada institusi kehutanan di NAD maka perlu kiranya untuk mengetahui bahwa selama 10 tahun terakhir ini setidaknya telah terjadi dua kali perubahan sistem organisasi pemerintahan di bidang kehutanan, yaitu : (1) hilangnya sistem organisasi KANWIL KEHUTANAN, dan (2) mergerisasi dinas-dinas teknis pasca otonomi daerah. Sedangkan kualitas SDM pada lembaga swadaya kehutanan lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika *the negative effect of common senses*.

Hilangnya sistem organisasi KANWIL Kehutanan pada awal tahun 2001 telah membawa hijrahnya hampir 90 % tenaga kehutanan yang pernah bertahun-tahun berkiprah di wilayah NAD. Hal ini tidak hanya menyebabkan berkurangnya SDM Kehutanan dari segi kuantitas, namun juga dalam segi kualitas, yaitu sejalan dengan ikut pindahnya berbagai pengetahuan dan pengalaman berharga pada SDM yang eksodus tersebut, dan terputusnya proses *tour on duty*. Dalam ilmu management SDM, *tour on duty* sampai saat ini masih diyakini sebagai salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan SDM dan cara terbaik untuk menstimulasi terciptanya *capability refreshment and enhancement*.

Mergerisasi dinas-dinas teknis pada pasca otonomi daerah telah membuat sektor kehutanan pada beberapa kabupaten digabungkan dengan sektor lain, seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Aceh Selatan, Bireun, Aceh Utara, Pidie, Langsa, dan Dinas Kehutanan Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan di Sabang. Meskipun proses mergerisasi ini dapat dimengerti sebagai usaha efisiensi yang dilakukan PEMKAB atas keterbatasan anggaran, namun tentu juga mudah dimengerti bahwa hal ini telah membuat hilangnya fungsi kontrol atas *conflict of interest* antara sektor kehutanan dan sektor perkebunan.

Dinamika *the negative effect of common senses* yang terjadi pada banyak sistem lembaga swadaya kehutanan (dan lingkungan) yang berkiprah di NAD diduga kuat terjadi karena adanya *in group feeling* yang sangat berlebihan. Meskipun *in group feeling* tersebut dapat dimengerti sebagai hal yang wajar pada populasi yang sedang mengalami konflik (sebelum perdamaian Helsinki), namun hal ini nampaknya telah terlanjur menjadi karakter

dan *trade mark* yang negatif serta kontra produktif untuk mencapai tujuan bersama. Selain menyebabkan terjadinya kompetisi yang sangat ketat dalam hal mendapatkan dana bagi kegiatan mereka, juga sangat jelas terlihat bahwa banyak lembaga swadaya kehutanan di NAD yang gagal menemukan relung kegiatan yang mumpuni untuk mendukung eksistensi mereka.

Meskipun dewasa ini ada beberapa lembaga swadaya kehutanan yang sedang berlimpah rejeki dan kegiatan dari berbagai sumber donor, namun secara umum kondisi lembaga swadaya kehutanan (dan lingkungan) di wilayah NAD secara objektif harus dikatakan ibarat hidup segan tapi matipun tak mau. Selain itu, perlu juga dicermati bahwa *turn over factor* sumberdaya manusia pada banyak lembaga swadaya kehutanan adalah sangat tinggi. Meskipun hal ini bisa dimengerti sebagai akibat adanya orientasi *earning money* pada SDM dalam beraktifitas pada berbagai lembaga swadaya kehutanan, namun perlu disadari bahwa *turn over factor* yang tinggi pasti akan berujung pada rendahnya kualitas pengalaman dan pembelajaran dalam bekerja.

#### **Efisiensi dan Efektifitas Program.**

Jika semua stake holder mau terbuka untuk mengevaluasi diri, maka barangkali akan sama-sama sepakat bahwa efisiensi dan efektifitas program berbagai institusi dan lembaga swadaya kehutanan di NAD selama ini tergolong sangat rendah. Salah satu penyebab utama yang patut dimengerti adalah *budgeting*, baik dalam arti kecukupan dana maupun dalam arti pengalokasian dana. Dalam konteks kecukupan dana, maka sudah menjadi rahasia umum bahwa rasio ketersediaan dana dengan kebutuhan dana bagi berbagai program kehutanan adalah sangat rendah. Jika pada skala kabupaten hal ini diperburuk oleh kepentingan sektoral, maka pada dana-dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat hal ini diperburuk oleh kepentingan wilayah, yang akhirnya selalu berujung pada pola lobi dan berbagi kue. Meskipun dalam 5 tahun belakangan ini sistem anggaran kehutanan dari Pemerintah Pusat semakin diperbaiki, namun dinamika realisasi anggaran dan sistem administrasi keuangan yang ada saat ini nampaknya masih belum memenuhi karakter program-program dalam bidang kehutanan. Sebagai contoh, keterlambatan realisasi anggaran menjadi salah satu penyebab timbulnya diskontinyu kegiatan yang berpengaruh sangat signifikan terhadap keberhasilan tanaman. Dan, yang lebih mendasar adalah bahwa pengalokasian anggaran yang ada saat ini ternyata hanya cukup untuk pembangunan tanaman secara konvensional (yang di lapangan hanya menimbulkan motivasi *cash for work*), sedangkan kebutuhan sesungguhnya adalah setidaknya pembangunan tanaman secara semi intensif.

Dalam konteks lembaga swadaya kehutanan, rendahnya efisiensi dan efektifitas program diduga kuat

diakibatkan oleh rasio pengalokasian dana antara *management cost* dan *field input* yang sangat tidak berimbang. Jika sejarah lembaga swadaya kehutanan di NAD ditelusuri bersama, maka akan sama-sama diketahui bahwa sesungguhnya sejak 20 tahun silam telah sangat banyak dana yang mengalir untuk berbagai program kehutanan di wilayah NAD melalui berbagai lembaga swadaya kehutanan. Namun demikian, jika saat ini dipertanyakan apa yang menjadi *memorial output* dari semua itu, maka sangat kuat diduga akan sulit ditemukan. Pada banyak kasus, ditemukan bahwa rasio *management cost* dan *field input* sangat spektakuler, yaitu 30 % : 70 % (bahkan pada beberapa kasus pasca tsunami pernah ditemui rasio 15 % : 85 %), sehingga tidak heran jika efisiensi dan efektifitas program menjadi sangat rendah.

Hal berikutnya yang juga perlu dicermati bersama adalah bahwa pola tahapan pelaksanaan program yang dipilih oleh lembaga swadaya kehutanan ternyata adalah umumnya sangat teoritis dan inefisien. Hal ini terjadi karena pemahaman yang dangkal terhadap paradigma *participatory development* (atau segala derivasi terminologi yang terkait dengan paradigma ini, seperti *community based development*, *bottom up development*). Meskipun paradigma ini mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, namun kiranya perlu disadari bahwa jika pola pelaksanaannya gagal dirancang secara efisien dan efektif maka yang akan terjadi adalah : (1) keletihan berproses yang berujung pada sikap apriori, (2) inefisiensi biaya dan waktu, dan bahkan (3) akan berkembang dan berubahnya situasi permasalahan secara total sehingga seluruh proses harus kembali diulang dari awal. Keterbukaan dan kejujuran akan kelemahan ini adalah merupakan salah satu kunci perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja lembaga swadaya kehutanan. Barangkali baik untuk disadari bahwa kemampuan untuk merancang pola pelaksanaan yang efisien dan efektif (tanpa harus meninggalkan esensi *partisipasi*) adalah merupakan tanggungjawab moral dan tanggung jawab profesionalisme setiap SDM yang terlibat dalam program.

#### **Networking.**

Salah satu hal yang menarik untuk didiskusikan dalam aspek *networking* adalah gagalnya pola kemitraan (baik yang bersifat intra institusi ataupun interinstitusi), dan kontra produktifnya pola oposisi yang sering diambil oleh banyak lembaga swadaya kehutanan. Dalam konteks intrainstitusi, banyak indikasi yang menunjukkan bahwa pola kemitraan menjadi gagal karena tersendat atau bahkan putus rantai komunikasi antara yang senior dan yang junior, sehingga proses pembelajaran bagi kematangan suksesi profesionalisme menjadi hilang. Dalam konteks interinstitusi, kendala bahasa (baik dalam arti bahasa teknis,



bahasa diplomasi, maupun dalam arti bahasa asing) adalah masalah serius yang sering terjadi dan sering berujung pada *placebo-networking*, yaitu kerjasama yang bersifat *lip-service* dimana esensi energi mutualisme yang seharusnya mereka dapatkan tidak tercipta sehingga pencapaian tujuan bersama menjadi tidak seimbang.

Pada dasarnya pola oposisi yang ditujukan untuk menciptakan fungsi kontrol dan fungsi tekanan dalam konstelasi politik sumberdaya alam adalah hal yang dapat dimengerti dan umum digunakan. Namun, perlu kiranya untuk diingat secara bersama bahwa jika penggunaan pola ini tidak dilengkapi dengan kecukupan dan kevalidan data, dan tidak dilengkapi dengan opsi solusi yang reliabel, maka berbagai komunikasi oposisional yang dilakukan hanya akan berujung pada *noisy*, iritasi dan konflik yang sangat kontra produktif. Lebih jauh, perlu juga untuk disadari bahwa pola oposisi mestinya adalah tidak boleh pernah bersifat merugikan kepentingan umum dan kepentingan berbangsa serta bernegara.

## KESIMPULAN

Untuk menunjukkan NAD menjadi provinsi hijau yang maju dan sejahtera maka diperlukan kerja keras dalam memperkuat dan membudayakan potensi alam dan modal sosial yang dimiliki masyarakat Aceh. Selain itu juga perlu meningkatkan kapasitas SDM, meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan serta memperluas *networking*.

Dalam kerangka upaya keras tersebut, sangat tepat jika ajaran moral dan etik yang terkandung didalam Al-Qur'an Surah An-Nahl (16) ayat 78 dapat dijadikan pegangan dan dorongan. Bunyi ayat tersebut adalah :

*”Dan ALLAH mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan DIA memberi kamu pendengaran, pengelihatn dan hati agar kamu bersyukur (Al-Qur'an 16:78)”*.

## DAFTAR PUSTAKA

Dinas Kehutanan Provinsi NAD. 2006. Statistik Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.